

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh salah satunya dari Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak hanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi dikelola oleh banyak Kementerian Lembaga, Salah satunya lembaga bea cukai.

Saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola oleh lebih dari 3.000 satuan kerja (satker) dengan jenis dan tarif PNBP yang beragam dengan jumlah lebih dari 15.000 jenis dan masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu Kementerian Lembaga yang menyelenggarakan, fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengelola berbagai jenis PNBP yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.

APBN merupakan salah satu piranti kebijakn fiskal, sebagai segenap kebijakan yang menyangkut pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara.

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan telah menetapkan, Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antar unit organisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas. Kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.

Dari hasil pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat membantu pendapatan Aset Negara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Instansi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang juga mempunyai struktur Organisasi yang sangat penting bagi Instansi, guna untuk mempermudah suatu perusahaan dan anggotanya untuk melakukan administrasi dan transaksi Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga pelaksanaan administrasi berjalan dengan lancar.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, Prosedur Operasi Standar Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang agar dapat menjelaskan dengan baik tentang PNBPN, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat memahami prosedur yang harus dilaksanakan importir, dari pengamatan beberapa pendapat importir pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh para pegawai atau customs sudah memuaskan para importir untuk melakukan atau penyerahan PNBPN. Namun dokumen yang telah diserahkan oleh para importir terkadang memakan waktu yang lama, karna keterlambatan dari penyelesaian dokumen dari pihak perkantoran, para importir juga mengharapkan penggantian penggunaan media PDE (pertukaran data elektronik) menjadi media elektronik yang akan memudahkan importir dalam melakukan pekerjaannya untuk melakukan prosedur PNBPN.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi judul tugas akhir penulis **“Prosedur Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang”**.

B. Rumusan masalah

Dengan adanya latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Apa saja upaya-upaya meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai dalam proses pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya meningkatkan pendapatan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam proses pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai pengetahuan dan pemahaman di dalam bidang perimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepabeanan.
- b. Agar penulis mengetahui prosedur kegiatan dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Dapat memberikan manfaat dan informasi kesemua pembaca yang dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

D. Metode penelitian

1. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Agustus 2014 di instansi pemerintah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Jenis data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang berbentuk buku, dokumen atau lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Dokumen

Dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan melihat buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisa data Penelitian

Setelah data-data yang sudah di kumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

G. Sistem penulisan tugas akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini, terhadap beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisannya.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, serta menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi serta uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai prosedur pemungutan PNBP, upaya-upaya meningkatkan pelayanan dan kendala-kendala yang dihadapi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B
Selatpanjang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan penulis

DAFTAR PUSTAKA